

STRATEGI KONTRA PROPAGANDA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM MENANGGULANGI PERKEMBANGAN RADIKALISME KONTEMPORER DI INDONESIA

COUNTER-PROPAGANDA STRATEGY OF NATIONAL AGENCY OF COUNTER- TERRORISM IN THE HANDLING OF CONTEMPORER RADICALISM DEVELOPMENT IN INDONESIA

Bambang Wiji Asmoro Sadarusalam¹, Bambang Wahyudi², Aris Arif Mundayat³

Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

(bambang.wiji@idu.ac.id)

Abstrak--Kajian ini menganalisis masalah kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi propaganda penyebaran paham radikal yang saat ini terjadi. Kandungan isi propaganda yang mengarah kepada perkembangan radikalisme sampai saat ini, secara luas dan terus menerus berlangsung baik melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah dari BNPT (Badan Nasional Penganggulangan Terorisme) melalui strategi kontra propaganda melawan perkembangan radikalisme, terutama yang mengarah kepada aksi terorisme. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori tentang perkembangan radikalisme di Indonesia oleh Vedi Hadiz dan teori komunikasi oleh Hafied Cangara. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi kontra propaganda yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memiliki tujuan yang jelas terkait penanggulangan radikalisme di Indonesia. Berbagai sarana prasarana berupa saluran media massa yang ada baik yang bersifat online maupun offline, telah dimanfaatkan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan wawasan perdamaian dan kebangsaan. Kajian ini juga menyumbangkan cara untuk menganalisis problem kontra propaganda baik dari sisi konten, permasalahan sumber daya manusia maupun metode kerjasama yang selama ini dilaksanakan oleh BNPT.

Kata Kunci: Strategi, Kontra Propaganda, Radikalisme, Media Sosial

Abstract--*This study analyzes the counter-propaganda problem of the National Counter Terrorism Agency in overcoming the propaganda of the spread of radicalism that is currently happening. The content of propaganda which leads to the development of radicalism, is widely and continuously taking place both through social media and other communication media. Therefore, it is very important to identify various obstacles faced by the BNPT (National Counter Terrorism Agency) in counter-propaganda strategies against the development of radicalism, especially those that lead to acts of terrorism. The theory used as a knife of analysis is a theory about the development of radicalism*

¹ Bambang Wiji Asmoro, M. Han. Lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Pertahanan, pada program peperangan Asimetris

² Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si., M.M Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik dan Dosen Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Aris Arif Mundayat, Ph.D Dosen Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

in Indonesia by Vedi Hadiz and the theory of communication by Hafied Cangara. The methodology of this study uses qualitative through descriptions. The results of this study found that counter-propaganda strategies carried out by the National Counterterrorism Agency had clear objectives related to counter-radicalism in Indonesia. Various infrastructure facilities in the form of mass media channels that exist both online and offline, have been utilized by the BNPT through the Peace Media Center to spread the insights of peace and nationality. This study contributes ways to analyze the problem of counter-propaganda both in terms of content, human resource issues and methods of cooperation that have been carried out by BNPT.

Keywords: Strategy, Counter-Propaganda, Radicalism, Social Media

Pendahuluan

Sejak 2002, Indonesia mengalami lima serangan bom yang signifikan yaitu bom Bali pertama pada 2002, serangan bom di Hotel J.W Marriott pada 2003, Bom Kedutaan Australia pada 2004, bom Bali kedua pada 2005, serta serangan simultan bom di Hotel J.W Marriot serta Ritz-Carlton pada 2009. Akibat serangan tersebut ratusan orang tewas serta ratusan lainnya terluka⁴. Dari beberapa aksi terorisme tersebut, yang terbesar dari segi jumlah korban dan pemberitaan internasional adalah bom Bali I dan II, bom di hotel Marriot, Kedutaan Australia, pasar Tentena, Poso, Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 juli 2009. Kemudian, setelah dibentuk BNPT pada tahun 2010, beberapa rentetan aksi terorisme masih terus terjadi sehingga menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan masyarakat

dan keamanan negara. Di antaranya adalah Bom Kalimalang 2010, Bom Masjid Cirebon 2011, Bom Gereja Solo 2011, Bom Mapolres Poso 2013, Bom Sarinah 2016, dan yang terbaru Bom Kampung Melayu 2017.⁵ Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pada tahun tahun 2016 terjadi 170 kasus terorisme yang naik secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 82 kasus⁶.

Berbagai aksi terror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki pemahaman agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme yang kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas, merasa termarginalkan, teralienasi, dan putus asa.

⁴<https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia>. Dikutip Tanggal 06/02/2018

⁵ *Ibid*,

⁶ <https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-teror-indonesia-2016>
Dikutip Tanggal 6/02/2018

Dalam menekan munculnya gerakan-gerakan tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Kemudian diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002⁷.

Akan tetapi, menurut survey dari lembaga *Alvara Research Center* dan *Mata Air Foundation* ditemukan bahwa adanya fenomena peningkatan pemahaman ideologi yang tidak selaras dengan ideologi Pancasila di dalam masyarakat

dimana data tersebut menunjukkan bahwa upaya dari pihak kelompok yang menginginkan adanya perubahan pembaruan sosial dan politik dengan cara apapun merupakan fenomena ancaman nyata yang terjadi saat ini di Indonesia. Data tersebut menunjukkan terdapat 23,4% pendapat yang menyatakan mahasiswa setuju dengan tegaknya negara Islam atau khilafah, 23,1% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam khilafah, 18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 6,7% Pegawai BUMN tidak setuju dengan ideology Pancasila, serta 0,1% berindikasi tidak setuju dengan Pancasila⁸. Salah satu penyebab peningkatan pemahaman yang tidak selaras dengan ideologi Pancasila tersebut disinyalir tidak terlepas dari berbagai usaha propaganda kelompok radikal untuk membentuk suatu jaringan baru dan mengarah secara langsung kepada masyarakat menggunakan berbagai media yang ada termasuk salah satunya adalah media sosial secara *online*.

Menurut data yang dihimpun oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika

⁷ Al Banna, Gamal, 2011. *Jihad*. Jakarta, hal. 148

⁸ Survey dari lembaga *Alvara Research Center* dan *Mata Air Foundation*. 2017

<https://republika.co.id/hasil-reset-soal-agama-dan-negara-di-indonesia>.

(Kemenkominfo) sampai dengan 26 Juni 2018 telah ditemukan sebanyak 5526 konten propaganda yang mengarah kepada paham radikal di beberapa media sosial. Temuan tersebut diantaranya melalui Situs/ Forum/ File sharing sebesar 614, Facebook dan Instagram sebanyak 2986, Youtube dan Google Drive 552, Telegram 502, dan yang terakhir adalah Twitter sebanyak 872⁹. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial saat ini menjadi kelompok yang rentan untuk terprovokasi oleh berbagai konten propaganda yang muncul di laman tersebut.

Kandungan isi propaganda yang mengarah kepada perkembangan radikalisme sampai saat ini, secara luas dan terus menerus berlangsung melalui media sosial maupun media komunikasi lainnya. Pelaksanaan strategi kontra propaganda oleh BNPT yang sementara ini berlangsung masih belum optimal dalam melawan propaganda kelompok radikal. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa propaganda radikalisme kontemporer yang dilakukan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan ideologi yang mereka yakini untuk

mengganti Pancasila sebagai ideologi negara telah cukup berhasil dalam mempengaruhi hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Berbagai faktor penyebab perkembangan radikalisme belum digunakan secara optimal sebagai konten dalam pelaksanaan strategi kontra propaganda di Indonesia sementara pihak kelompok radikal selalu menggunakan berbagai issue terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk dijadikan bahan atau konten dalam propaganda yang mereka lakukan terutama dalam menyerang berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimana hal tersebut pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa proses kontra radikal (termasuk kontra propaganda) yang sementara ini berlangsung setelah terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme, belum terlaksana secara optimal dalam menekan penyebaran paham radikal yang saat ini terjadi atau dengan kata lain proses radikalisasi lebih cepat daripada proses deradikalisasi yang sementara berlangsung. Pihak kelompok radikal akan

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika: Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Penanganan Konten Radikalisme dan Terrorisme.

Pada acara Symposium Penanganan Radikalisme dan Terrorisme di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta 6 Juli 2018.

selalu berusaha untuk mendapatkan kendali pengaruh atas masyarakat untuk menolak nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Apabila hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi gangguan nyata bagi stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan berbagai gambaran dan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk membuat kajian strategi kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi kontra propaganda untuk menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia dilakukan oleh BNPT, serta bagaimana optimalisasi strategi kontra propaganda BNPT untuk menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian tentang strategi kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif analitis. Pendekatan ini memusatkan pemahaman terhadap perilaku, keputusan, kepercayaan, dan nilai yang melekat pada diri manusia. Selain itu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, peneliti berharap dapat menghasilkan sebuah deskripsi yang mendalam dari temuan penelitian dengan bahasa yang lebih dapat dipahami oleh semua pihak, baik dari kalangan pemerhati ilmu sosial sendiri maupun masyarakat awam.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah berbagai informan yang menjadi subyek penelitian sehingga didapatkan beberapa data primer. Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen penting dan mendukung penelitian seperti dokumentasi.

Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana artinya adalah teknik

pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya pengambilan data biasa menjadi difokuskan dan mendalam. Para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi.

Pembahasan

Tujuan dari pembahasan adalah untuk mendapatkan hasil analisa serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan membutuhkan lebih banyak penjelasan atau pembahasan serta penguraian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik yang berbeda di lapangan. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk bersikap obyektif terkait permasalahan yang didapatkan dan memberikan pemahaman serta penjelasan kepada pembaca mengenai kejadian faktual dan interpretasi analisis hasil yang didapatkan di lapangan tanpa adanya unsur subyektifitas dari peneliti.

Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan

Radikalisme Kontemporer di Indonesia

Dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan BNPT dan segenap jajaran termasuk instansi lainnya, dibutuhkan suatu strategi yang tepat guna menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dianggap sebagai suatu seni untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai langkah yang telah dibuat agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Guna menganalisa strategi propaganda (kontra propaganda) yang digunakan oleh BNPT terutama dari jajaran Sub Direktorat Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan digunakan pendekatan teori yang disampaikan oleh Mintzberg, dimana dalam menilai sebuah strategi itu sekurang-kurangnya perlu dilihat dalam 5 pengertian yang saling terkait yaitu:

- a. Strategi sebagai sebuah perencanaan (*Plan*) untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
- b. Strategi sebagai acuan taktik (*Ploy*) yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.

- c. Strategi sebagai penilaian pola (*Pattern*) /sudut pandang yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d. Strategi sebagai sebuah posisi (*Position*) yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e. Strategi sebagai perspektif (*Perspective*) dalam mengambil rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Selain itu analisa terhadap strategi kontra propaganda BNPT, juga dilihat dari perpektif ilmu komunikasi dimana pada dasarnya propaganda adalah sebuah bentuk komunikasi yang pada akhirnya bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat diterima oleh target audiens. Dalam teori yang dikemukakan oleh Hafied Cangara¹⁰, tujuan dalam sebuah komunikasi adalah :

- a. Pesan yang disampaikan dapat dimengerti
- b. Memahami apa yang diinginkan oleh orang

c. Supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu

Unsur-unsur komunikasi juga merupakan faktor penting yang digunakan dalam menganalisa berbagai unsur yang ada di dalam strategi propaganda (kontrapropaganda) dari BNPT dimana unsur-unsur tersebut meliputi sumber, pesan, media, penerima, dan efek yang ditimbulkan (hal ini juga selaras dengan model komunikasi dari Harold D. Lasswell (1948) yang menyatakan *Who, Says What, in which channel, to whom, and with what effect*).

Mengingat strategi kontrapropaganda yang dilaksanakan bertujuan untuk menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer yang saat ini berlangsung di Indonesia, maka perlu dipahami pula berbagai faktor yang menjadi penyebab dan pemicu berkembangnya paham tersebut di Indonesia guna mengidentifikasi berbagai *issue* yang dijadikan alasan oleh pihak kelompok radikal dalam upaya melegitimasi gerakannya.

Dalam pembahasan sebuah strategi dibagi menjadi 3 kategori, Pertama (*Ends*)

¹⁰ Tujuan komunikasi menurut Hafied Cangara dalam Pengantar Ilmu Komunikasi (2010).

tujuan atau sebagai sebuah strategi, dapat dilihat berdasarkan data primer dan sekunder yang didapatkan oleh peneliti dari BNPT, telah ditetapkan tujuan (*ends*) dari strategi propaganda (kontra propaganda) yang dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi pola penyebaran propaganda kelompok radikal, mencegah penyebaran propaganda radikal di tengah masyarakat, membentengi masyarakat dengan kontra narasi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat, serta meningkatkan *awareness* masyarakat agar mampu menangkal dan melawan propaganda dari kelompok radikal dimana hal tersebut juga sudah tertera di dalam *Blueprint* Pencegahan Terorisme yang saat ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas BNPT. Mengacu kepada teori strategi dari Mintzberg dimana strategi sebagai sebuah perencanaan (*plan*) untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa strategi propaganda (kontra propaganda) BNPT yang saat ini dilaksanakan telah memiliki tujuan dan perencanaan yang jelas. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah strategi yang ada harus mampu menjadi pedoman dalam pengembangan

taktik pelaksanaan (*Ploy*) dimana sesuai dengan teori strategi Mintzberg yang menyatakan bahwa strategi merupakan acuan taktik yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Strategi harus dapat digunakan sesuai dengan perkembangan dinamika ancaman yang dihadapi terutama terkait berbagai *issue* yang dijadikan bahan propaganda oleh pihak kelompok radikal.

Sebagai sebuah perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah membuat perencanaan strategi kontra propaganda yang dituangkan dalam suatu rencana strategis tahun 2010-2014 dan diperbaharui 2015-2019. Perencanaan yang dilakukan BNPT dengan melakukan kontra propaganda terhadap propaganda kelompok radikal, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh adanya propaganda yang disebarkan (pencegahan dalam artian peningkatan imunitas masyarakat dari paparan paham radikal).

Maka dapat dilihat bahwa aspek *ends* (tujuan) yang ada di dalam strategi kontra propaganda BNPT dalam menanggulangi perkembangan radikalisme di Indonesia dapat dinilai

sebagai sebuah perencanaan yang baik dimana tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi tersebut dapat memperjelas arah yang harus ditempuh oleh BNPT dalam melaksanakan tugasnya. Namun sebagai sebuah acuan taktik pelaksanaan, BNPT harus dapat mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai langkah taktik pelaksanaan kontra propaganda yang sesuai dengan dinamika ancaman yang ada terutama dalam melawan propaganda dari pihak kelompok radikal.

Kedua, (means) sarana prasarana, pada dasarnya berbagai sarana prasarana yang digunakan adalah untuk mendukung pelaksanaan kontra propaganda yang bersifat *online* dan *offline*. Teknologi MDA digunakan dalam rangka melakukan filterisasi data berdasarkan wilayah (Indonesia), Media Online, Media Sosial, Forum Diskusi yang pada prinsipnya bersifat *online*. Setelah teridentifikasi maka sumber media yang terindikasi memiliki nuansa propaganda dari pihak kelompok radikal kemudian dilaporkan kepada pihak kemenkominfo untuk proses *take down*.

Dari segi *offline*, sebagaimana diketahui bahwa kelompok radikal masih menggunakan sarana yang lama seperti penyebaran propaganda melalui buku

cetak, bulletin, lembaga pendidikan dan berbagai kegiatan di majlis taklim. Hasil identifikasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada pihak aparat keamanan kewilayahan dimana dalam hal ini pihak kepolisian, guna penanganan secara hukum lebih lanjut. Selain itu, menurut informan (11), pemberdayaan aparat kewilayahan baik dari TNI maupun Polri juga menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pihak BNPT karena sangat efektif dalam mengidentifikasi berbagai bentuk propaganda *offline* dari pihak kelompok radikal sehingga pada akhirnya penanganan yang dilakukan dapat segera terlaksana.

Berbagai saluran media massa yang ada baik yang bersifat *online* maupun *offline*, digunakan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan berbagai berita positif guna mempengaruhi masyarakat agar tidak terpengaruh berbagai bentuk ajakan yang dipropagandakan oleh pihak kelompok radikal. Sesuai dengan informasi yang diterima dari Direktur Pengelolaan Media kemenkominfo, pihak kemenkominfo yang juga merupakan mitra kerjasama dari BNPT dalam penanggulangan propaganda kelompok radikal juga turut membuat berbagai pemberitaan positif tentang pelaksanaan berbagai program

pemerintah maupun juga yang berisikan tentang berbagai hal terkait nilai-nilai kebangsaan. Seluruh saluran media yang ada dibanjiri dengan berbagai pemberitaan positif dengan maksud untuk mempersempit ruang gerak dari saluran yang digunakan oleh pihak kelompok radikal.

Saluran media merupakan sarana (*means*) yang menjadi kunci utama serta bersifat mutlak dalam aktivitas penyebaran propaganda pihak kelompok radikal maupun dalam pelaksanaan kontra propaganda dari pemerintah (BNPT), untuk itu kendali atas berbagai saluran media yang ada harus dapat dipegang penuh oleh pihak pemerintah atau dalam hal ini pihak BNPT. Berbagai undang-undang yang ada baik UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No.19/ 2016 dan UU No.5/ 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada dasarnya telah memberikan dasar legalitas yang kuat untuk pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap berbagai saluran media yang ada. Namun satu hal yang harus diantisipasi adalah adanya berbagai perkembangan di dalam teknologi komunikasi dan informatika yang pada dasarnya selalu terus berubah dan berkembang secara dinamis. Aspek sarana prasarana dalam strategi kontra

propaganda dari pihak BNPT harus dapat mengimbangi dinamika tersebut mengingat pihak kelompok radikal juga selalu mengikuti berbagai perkembangan teknologi yang terjadi serta menggunakannya untuk tujuan yang telah mereka tetapkan. Berdasarkan pada hasil identifikasi atas saluran media yang digunakan oleh pihak kelompok radikal, pihak BNPT telah menjalankan program *media literacy* yang bersifat *offline* maupun *online* yang terintegrasi bersama para pemangku kepentingan dengan menggunakan berbagai saluran media baik berbentuk digital, elektronik, penyiaran, cetak maupun konvensional seperti kegiatan dialog dan *workshop* dalam rangka penanggulangan perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia.

Ketiga, (Ways) Cara/ metode, penanganan masalah indoktrinasi terlebih terkait dengan radikalisme tidak hanya dapat dilawan melalui strategi *hard approach* dari BNPT, akan tetapi penanganan masalah radikalisme juga harus ditangani dengan penanganan *soft approach*. Dalam pelaksanaan kontra propaganda, BNPT menggunakan dua metode, yaitu metode *online* dan metode *offline* dengan konten utama dalam strategi kontra propaganda Pusat Media

Damai adalah berupa penyebaran wawasan perdamaian dan kebangsaan

Metode *offline* yang dilakukan oleh PMD adalah dengan mengadakan seminar-seminar, melaksanakan kegiatan penguatan koordinasi dengan K/L, peran aktif komunitas blogger, membangun jejaring komunitas, melakukan pelatihan internet damai terhadap generasi muda, dan pelibatan ulama dan tokoh agama dlm kampanye damai di dunia maya. Selain itu juga meluncurkan buku-buku yang didistribusikan secara gratis dan berisikan informasi tentang terorisme. Sedangkan secara online kegiatan yang telah dilakukan oleh PMD adalah monitoring media online (situs/ sosmed), pemberdayaan media Informatif, pemberdayaan media edukatif, pemberdayaan portal komunitas damai, mensinergikan seluruh jejaring komunitas damai dalam mewujudkan program damai di dunia maya. Selain itu guna mengantisipasi adanya fenomena propaganda yang diduga masuk melalui berbagai materi pembelajaran anak sekolah maka dilakukan kerjasama dengan pihak Kementerian pendidikan nasional dan Kemenristekdikti serta dengan Kementerian agama untuk melakukan perlawanan terhadap penyebaran paham radikal.

Selain melaksanakan fungsi sebagai badan koordinasi, BNPT juga membentuk berbagai satgas sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas sesuai dengan undang-undang, dimana salah satunya adalah satgas pencegahan dalam upaya penanggulangan perkembangan radikalisme di Indonesia. Kemudian sebagai salah satu bentuk terobosan kreatif yang ada adalah dengan dibentuknya Duta damai berdasarkan kriteria tertentu untuk menyebarkan berbagai bentuk perlawanan terhadap penyebaran paham radikal, dilakukan dengan koordinasi melalui para ulama, NU, Muhammadiyah, cendekiawan, komunitas *Platform* media sosial, dll.

Pergerakan kelompok radikal yang saat ini terjadi di Indonesia, dapat dilihat sebagai sebuah bentuk peperangan ireguler antara pemerintah Indonesia dengan pihak kelompok radikal dimana jika mengacu kepada konsep dari peperangan ireguler itu sendiri, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh terhadap populasi yang relevan atau dalam hal ini adalah masyarakat. Propaganda merupakan salah satu alat perang yang digunakan oleh kelompok radikal dalam mencapai tujuan penyebaran paham yang mereka yakini dan untuk mendapatkan

legitimasi atas berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Mengacu kepada teori propaganda dari Soelhi yang membagi propaganda menjadi 3 tipe yaitu propaganda putih, propaganda kelabu, dan propaganda hitam, maka bentuk propaganda dari kelompok radikal dapat dikategorikan dalam tipe propaganda kelabu dan propaganda hitam dimana tujuan dari propaganda kelabu dan hitam pada dasarnya adalah untuk mengacaukan pikiran orang lain dengan menyebarkan informasi palsu untuk menggertak dan mengadu domba pihak lawan. Propaganda digunakan untuk mempengaruhi dan mengendalikan hati serta pikiran dari target yang menjadi sasaran dimana dalam hal ini adalah masyarakat. Yang perlu menjadi perhatian oleh pihak pemerintah terutama BNPT selaku *leading sector* dalam penanggulangan terorisme termasuk radikalisme adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok radikal termasuk di dalamnya yang berupa propaganda, sesuai dengan teori dari Clancy, akan dilaksanakan secara berkesinambungan (*sustainable*), guna mendapatkan keabsahan (*legitimacy*), dan dalam rangkaian kegiatan yang bersifat stabil (*stability*). Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang menentukan

kemenangan dalam sebuah peperangan ireguler dimana kemenangan akan berada pada pihak yang memiliki kendali dan pengaruh atas hati dan pikiran (*heart and mind*) dari masyarakat.

Hal penting yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh BNPT adalah konten yang digunakan dalam pelaksanaan strategi kontra propaganda. Konten yang berisikan wawasan perdamaian dan kebangsaan belum menyentuh berbagai faktor penyebab dan pencetus dari munculnya radikalisme itu sendiri mengingat berbagai *issue* terkait bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya akan selalu digunakan oleh pihak kelompok radikal sebagai bahan propaganda mereka dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Identifikasi dari beberapa faktor pencetus radikalisme tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teori dimana salah satunya adalah teori dari Veda Hadiz. Teori dari Veda Hadiz menyatakan bahwa secara khusus di Indonesia, perkembangan radikalisme adalah merupakan hasil dari benturan kelas antara *subordinated class* dengan *ruling class* yang terjadi selama orde baru. Beberapa *issue* tersebut adalah:

- Kesenjangan sosial politik (benturan kelas di dalam masyarakat).

- Sikap pemerintah terhadap berbagai *issue* yang terkait dengan agama Islam.
- Kebijakan pemerintah terkait kesempatan kerja dan kesempatan usaha, serta program pengentasan kemiskinan.
- Kebijakan penyelesaian konflik sosial yang terkait dengan agama.
- Penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran terutama ayat terkait *qital* (perang).
- Intoleransi terhadap keberagaman agama sejak dini (usia sekolah).

Optimalisasi Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia

Secara umum optimalisasi merupakan suatu standar nilai terbaik yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu tugas atau rencana yang sedang dilaksanakan. Tujuan utama dari optimalisasi sendiri adalah untuk meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Di dalam menjalankan strategi kontra proganda, tugas utama dari BNPT adalah berkoordinasi untuk mengounter propaganda dari kelompok radikal. Untuk itu diperlukan optimalisasi strategi kontra proganda yang dimiliki termasuk

mengoptimalkan sinergitas antar kementerian dan lembaga di Indonesia.

Optimalisasi strategi propaganda (kontra propaganda) yang dilakukan oleh BNPT adalah berkoordinasi dengan Kementrian dan lembaga lainnya atau dengan kata lain peningkatan kerjasama lintas sektoral. Di samping melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan koordinasi, BNPT juga membentuk berbagai satgas sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas sesuai dengan undang-undang, dimana salah satunya adalah satgas pencegahan dalam upaya penanggulangan perkembangan radikalisme di Indonesia. Kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan pada dasarnya telah diperkuat dengan Keputusan Menkopolhukam tentang peraturan pelaksanaan program penanggulangan terorisme dalam Keputusan Nomor 42 tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Kementrian/ Lembaga Pelaksana Program Penanggulangan Terorisme, dimana BNPT bertindak sebagai koordinator pelaksana tugas yang pada hakekatnya memiliki wewenang untuk mengoptimalkan berbagai langkah yang diperlukan secara lintas sektoral dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk pelaksanaan tugas di bidang kontra Propaganda. Guna menjamin efektifitas

dari kerjasama yang dilakukan, dapat digunakan prinsip kerjasama berdasarkan teori dari Edralin yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, dan konsensus. Kerjasama lintas sektoral yang dilakukan harus dapat terlaksana dengan berbagai prinsip yang telah disebutkan sebelumnya guna menjamin keberhasilan pencapaian target maupun tujuan yang telah ditetapkan dimana BNPT harus mampu mengarahkan dan mengkoordinir berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan. Pembagian tugas yang efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pertanggung jawaban tugas yang jelas serta motivasi tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama merupakan beberapa komponen penting dalam optimalisasi unsur metode dalam sebuah pelaksanaan strategi.

Salah satu bentuk kerjasama yang telah terlaksana adalah dengan pihak Kemenkominfo yang juga bertanggung jawab untuk pembuatan Narasi tunggal. Narasi tunggal merupakan bagian dari bentuk pernyataan resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh pihak Kemenkominfo selaku *Public Relation* dari pemerintah tentang berbagai *issue* yang berkembang maupun juga tentang berbagai hal lain yang terkait dengan pencapaian dari

program pemerintah yang telah dilaksanakan. Kemenkominfo bersifat sebagai pembina dari seluruh pengusaha media yang beroperasi di Indonesia agar pihak media dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan media sebagai *private sector* dan kepentingan negara melalui editor forum dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kemenkominfo terutama dari Direktorat Pengelolaan Media telah mengambil langkah untuk mengisi dan membanjiri semua kanal kanal (saluran media) yang ada dengan berbagai pemberitaan yang berkonten positif sebagai bentuk perwujudan strategi dalam mengantisipasi perkembangan berbagai *issue* yang ada termasuk perkembangan propaganda dari pihak kelompok radikal. Terobosan kreatif dari direktorat pengelolaan media pada saat ini berupa: Netizen 2020, relawan TIK, Gen-Postthink dimana pada dasarnya merupakan bentuk upaya dari kemenkominfo dalam memberdayakan masyarakat terutama generasi muda untuk menyebarkan berbagai pemberitaan positif terkait *issue* apapun yang berkembang termasuk bagaimana menyikapi dan melawan adanya berbagai bentuk berita negatif terhadap pemerintah yang merupakan bagian dari propaganda kelompok

berpaham radikal. Hal tersebut sesuai dengan teori komunikasi yang disampaikan oleh Cangara bahwa komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan mempengaruhi (*to influence*). Agar komunikasi berlangsung efektif, komunikator harus tahu khalayak mana yang akan dijadikan sasaran dan tujuan yang diinginkannya. Kontra propaganda yang dilakukan oleh BNPT dan Kemenkominfo ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas agar tidak terprovokasi oleh berbagai konten radikal dengan memberikan konten-konten yang berisikan nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kerjasama dalam mengidentifikasi berbagai ancaman dan potensi ancaman yang terjadi di ruang siber terkait aktivitas propaganda kelompok radikal secara *online* juga telah terlaksana dengan baik antara pihak BNPT dan BSSN yang pada dasarnya juga memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan *information monitoring* sebagai bentuk upaya deteksi dan pencegahan penyebaran radikalisme di dunia maya.

Berdasarkan diidentifikasi terdapat 2 unsur manajemen yang dinilai masih

menjadi faktor kelemahan dan perlu menjadi perhatian dalam optimalisasi strategi kontra propaganda BNPT yaitu sumber daya manusia (*man*) dan metode (*methode*). Unsur kurangnya sumber daya manusia (*man*) yang handal dalam menjalankan, merancang, serta melaksanakan strategi kebijakan, dan program kontra propaganda yang telah ditetapkan merupakan salah satu unsur dalam perspektif manajemen yang perlu segera ditangani dengan penambahan personel BNPT sesuai dengan kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan mengacu kepada aspek *Skill* (keahlian), *Knowledge* (pengetahuan), dan *Attitude* (sikap). Unsur lain yang perlu mendapat perhatian dalam optimalisasi pelaksanaan strategi propaganda dari BNPT adalah unsur metode (*Methode*). Salah satu hal penting yang harus selalu diperhatikan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan dari aspek fungsi manajemen adalah mekanisme *controlling* dimana fungsi ini bertujuan untuk memastikan dan mengukur pencapaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari Sub Dit Kontra Propaganda BNPT. Proses analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontra propaganda baik dengan metode *online* maupun *offline* harus secara berkala dilakukan mengingat dinamika

perkembangan lingkungan eksternal yang cukup progresif. Kerjasama lintas sektoral yang dilakukan sebagai bentuk optimalisasi kontra propaganda BNPT harus memenuhi beberapa prinsip penting yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, dan konsensus. Berbagai inovasi maupun terobosan kreatif yang dilakukan pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Adanya beberapa program yang dapat dinilai sebagai sebuah keunggulan atau kekuatan yang dimiliki oleh pihak BNPT terutama Subdit Kontra Propaganda seperti pendirian Pusat Media Damai (PMD) yang fokus dalam memonitoring dan menganalisa propaganda media radikal serta melakukan kontra propaganda dengan pendekatan multi media, pembentukan komunitas relawan dari generasi muda melalui Duta Damai Dunia Maya sebagai mitra untuk mengkampanyekan perdamaian melalui bahasa anak muda (sesuai dengan era generasi yang ada), pemanfaatan kerjasama dengan media mainstream baik cetak, online dan penyiaran sebagai media partner propaganda, berbagai bentuk pelatihan kepada anak-anak muda untuk cerdas literasi digital di bangku sekolah, serta penerbitan buku yang disesuaikan dengan taraf bacaan berdasarkan

segmentasi usia yang berisikan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan merupakan upaya yang harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan disesuaikan dengan dinamika ancaman yang terjadi terutama pada fenomena perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi kontra propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi kontra propaganda yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memiliki tujuan (*Ends*) untuk mengidentifikasi pola penyebaran propaganda kelompok radikal, mencegah penyebaran propaganda radikal di tengah masyarakat, membentengi masyarakat dengan kontra narasi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat, serta meningkatkan *awareness* masyarakat agar mampu menangkal dan melawan propaganda dari kelompok radikal. Berbagai sarana prasarana (*Means*)

berupa saluran media massa yang ada baik yang bersifat *online* maupun *offline*, digunakan oleh pihak BNPT melalui Pusat Media Damai untuk menyebarkan berbagai berita positif guna mempengaruhi masyarakat agar tidak terpengaruh berbagai bentuk ajakan yang dipropagandakan oleh pihak kelompok radikal. Keterpaduan penggunaan sarana perangkat yang ada dalam rangka deteksi dini dan pencegahan terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia dapat terlaksana dengan baik melalui kerjasama lintas sektoral yang terjalin selama ini terutama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam pelaksanaan kontra propaganda (*Ways*), BNPT menggunakan dua metode, yaitu metode *online* dan metode *offline*. Konten yang utama dalam strategi kontra propaganda Pusat Media Damai adalah berupa penyebaran wawasan perdamaian dan kebangsaan terutama melalui metode *online* (sesuai dengan jenis media yang digunakan oleh kelompok radikal pada saat ini). Strategi kontra propaganda secara *off line* juga dilaksanakan oleh BNPT dengan meluncurkan berbagai artikel

dan tulisan melalui media cetak. Pembentukan duta damai yang berada di bawah kendali Pusat Media Damai merupakan sebuah terobosan kreatif dari pihak BNPT untuk dapat membantu pelaksanaan kontra propaganda dengan menggunakan pendekatan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda. Kontrapropaganda secara aktif dengan tujuan untuk melawan propaganda pihak kelompok radikal juga dilaksanakan oleh pihak BNPT.

2. Optimalisasi strategi kontra propaganda yang dilaksanakan oleh BNPT sudah berjalan cukup baik, namun dapat diidentifikasi adanya 2 permasalahan terkait dengan optimalisasi strategi kontra propaganda yang dilaksanakan oleh BNPT dalam menanggulangi perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia. Adapun kedua masalah tersebut terletak pada unsur sumber daya manusia (*man*) dan metode (*methode*) jika dilihat dari perspektif unsur manajemen. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan beban tugas yang ada serta pelaksanaan koordinasi lintas sektoral merupakan kelemahan yang harus segera diatasi agar pelaksanaan tugas

kontra propaganda dapat berjalan dengan lebih optimal. Terobosan kreatif dalam bentuk Duta damai sebagai relawan dalam membantu tugas BNPT pada dasarnya bertujuan untuk membangun dan memperkuat ketahanan generasi muda secara mandiri untuk menolak dan melawan berbagai bentuk propaganda dalam penyebaran paham radikal di Indonesia melalui gaya bahasa yang mudah dipahami maupun melalui berbagai *issue* yang menjadi topik pembicaraan (*trend*) pada generasi tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemangku kebijakan sebagai bahan masukan. Seperti:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme khususnya Sub Direktorat Kontra Propaganda agar menggunakan berbagai *issue* yang telah teridentifikasi sebagai faktor-faktor pemicu dalam perkembangan radikalisme kontemporer di Indonesia sebagai bahan konten dari kontra propaganda yang dilaksanakan. Adapun beberapa *issue* tersebut terkait kesenjangan sosial politik (benturan kelas di dalam masyarakat), sikap pemerintah

terhadap berbagai *issue* yang terkait dengan agama Islam, kebijakan pemerintah terkait kesempatan kerja dan kesempatan usaha, serta program pengentasan kemiskinan, kebijakan penyelesaian konflik sosial yang terkait dengan agama, penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran terutama ayat terkait *qital* (perang), intoleransi keberagaman agama sejak dini (usia sekolah).

Perlunya penelitian secara khusus terhadap efektivitas penggunaan berbagai *issue* terkait dengan faktor pencetus radikalisme sebagai konten kontra propaganda dengan pendekatan kuantitatif oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan pihak Universitas Pertahanan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi pelaksanaan strategi kontra propaganda yang dilaksanakan.

2. Perlunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam melakukan rekrutmen penambahan personel yang memiliki kompetensi di dalam bidang kontra propaganda terutama yang bersumber dari Universitas Pertahanan.

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pihak akademisi

terutama dari Universitas Pertahanan terkait sinergitas lintas sektoral pada jajaran kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan tugas BNPT sesuai keputusan Menkopolhukam No. 42 tahun 2018 tentang Koordinasi antar Kementerian/ Lembaga Pelaksana Program Penanggulangan Terorisme dengan pendekatan kualitatif keorganisasian, kebijakan dan strategi organisasi dengan tujuan agar dapat diketahui lebih dalam tentang efektivitas kerjasama yang telah berjalan.

Daftar Pustaka

- Agus, SB. 2014: *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Daulat Press
- Agustini. 2013. *Penegelolaan dan Unsur Manajemen*. Jakarta: Citra Pusaka
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta
- Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publications.
- Ginting Munthe, Moeryanto, *Propaganda dan Ilmu Komunikasi*, Jurnal IISIP, Vol. IV, No. 1, Edisi Juni 2012
- George, Terry dan Leslie W. Rue. 2000. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hadiz, Vedi R. 2009. *Islamic Populism and Political Transition in Post-Soeharto Indonesia*, disampaikan pada Seminar Internasional tentang Transisi Politik di Indonesia. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Miles, Matthew B. 2014, *Qualitative Data Analysis, California, SAGE*
- Mintzberg, Henry, James Brian Quinn, dan Jhon Voyer. 1995. *“The Strategy Process”*. London: Prentice Hall International, Inc.,
- Nurudin. 2008. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Palan, R. 2007. *Competency Management A Practioner’s Guide*. Kuala Lumpur: Lumpur SMR Publishing
- Ridwan, Habib. 2014. *Thesis-Efektivitas Metode Penggalangan Intelejen Terhadap Mantan Narapidana Kasus Terorisme*. Universitas Indonesia
- Soelhi, Mohammad. 2012. *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Reakatama Media
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01 / K.BNPT/I/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 2 dan 3

Pusat Media Damai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2017

Kementerian Komunikasi dan Informatika: Peran Kementerian Komunikasi dan

Informatika Dalam Penanganan Konten Radikalisme dan Terorisme. Pada acara Symposium Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta 6 Juli 2018.

<https://republika.co.id/hasil-reset-soal-agama-dan-negara-di-indonesia>.
Dikutip Tanggal 25 Maret 2018

<https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia diakses pada tanggal 6/02/2018>

<https://www.rappler.com/indonesia/data-dan-fakta/156900-daftar-aksi-rencana-teror-indonesia-2016> dikutip Tanggal 6/02/2018